

Pergeseran Paradigma Kebudayaan Kewargaan: Dekonstruksi Nilai Gotong Royong Pada Tradisi Pesta Sekolah Di Desa Golo Langkok

Venansius Gabur^{a,1*}, Dorkas Yufice Ariyanti Kale^{a,2}, Thomas Kemil Masi^{a,3}, Fadil Mas'ud^{a,4}, Anif Istianah^{a,5}

^a Universitas Nusa Cendana, Indonesia

¹ sobinaanut@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 November 2025;

Revised: 8 Desember 2025;

Accepted: 24 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Pendidikan Kewarganegaraan;
Solidaritas Sosial;
Pergeseran Paradigma;
Komodifikasi Budaya;
Kearifan Lokal Manggarai.

: **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan sudut pandang masyarakat terhadap tradisi Pesta Sekolah di Desa Golo Langkok serta mengidentifikasi faktor penentu transformasi budaya tersebut menjadi sarana pencarian keuntungan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh adat, penyelenggara, serta warga penyumbang. Landasan teoretis yang digunakan untuk membedah fenomena ini adalah teori solidaritas sosial Emile Durkheim dan teori dinamika kebudayaan Pitirim Sorokin. Hasil penelitian mengungkapkan terjadinya penurunan nilai ketulusan menjadi orientasi materi yang praktis, di mana tradisi kini lebih berfungsi sebagai alat pengumpulan uang dan pembuktian status sosial daripada dukungan pendidikan murni. Temuan menunjukkan adanya penyimpangan alokasi dana yang dialihkan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga memicu risiko putus sekolah bagi mahasiswa. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis mengenai peralihan motif pengabdian sosial menjadi kepentingan ekonomi pribadi berdasarkan penurunan etika kewargaan lokal. Studi ini berkontribusi pada bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui implikasi penguatan nilai karakter dan kebijakan sipil (*civic values*). Direkomendasikan adanya revitalisasi norma adat untuk memulihkan fungsi asli tradisi sebagai jaring pengaman pendidikan.

ABSTRACT

Shifting Community Paradigm On The Civic Culture: Deconstruction Of Gotong Royong Values In The School Party Tradition In Golo Langkok Village. This study aims to analyze the changes in community perspectives on the School Party tradition in Golo Langkok Village and to identify the determinants of this cultural transformation into a means of profit-seeking. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observations and interviews with customary leaders, organizers, and contributing residents. The theoretical foundation used to dissect this phenomenon is Emile Durkheim's theory of social solidarity and Pitirim Sorokin's theory of cultural dynamics. The research findings reveal a decline in the value of sincerity, shifting toward a practical material orientation, where the tradition now functions more as a means of raising money and demonstrating social status than as genuine educational support. The findings show misallocation of funds diverted to consumptive needs, thereby increasing the risk of students dropping out. The novelty of this study lies in the critical analysis of the shift from social service motives to personal economic interests based on the decline of local civic ethics. This study contributes to the field of Pancasila and Citizenship Education through implications for strengthening character values and civic virtues. It is recommended to revitalize customary norms to restore the original function of tradition as an educational safety net.

Keywords:

Civic Education;

Social Solidarity;

Paradigm Shift;

Cultural Commodification;

Manggarai Local Wisdom.

Copyright © 2025 (Venansius Gabur, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Gabur, V., Kale, D. Y. A. ., Masi, T. K. ., Mas'ud, F. ., & Istianah, A. . (2025). Pergeseran Paradigma Kebudayaan Kewargaan: Dekonstruksi Nilai Gotong Royong Pada Tradisi Pesta Sekolah Di Desa Golo Langkok. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(8), 344–355. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i8.4407>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia kontemporer yang memerlukan kolaborasi sinergis antara institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat (Pratama & Khairunnisa, 2025). Sebagai instrumen transformasi sosial, pendidikan tinggi yang berkualitas memegang peran strategis untuk memutus rantai kemiskinan sistemik sekaligus meningkatkan kualitas peradaban bangsa (Tusriyanto et al., 2024). Namun, masyarakat berpenghasilan rendah sering kali sulit melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena terbebani oleh tingginya total biaya kuliah dan kebutuhan pendukungnya (Susanto et al., 2025). Kondisi ini diperparah oleh realitas empiris di Kabupaten Manggarai, di mana instrumen statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan Garis Kemiskinan yang menyentuh angka Rp541.171 per kapita per bulan, sebuah indikator yang menegaskan beratnya tekanan finansial domestik serta rentannya akses pembiayaan studi bagi generasi muda setempat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, 2026). Menghadapi tantangan tersebut, komunitas lokal di Desa Golo Langkok mengonstruksi mekanisme jaminan sosial mandiri berbasis kearifan lokal yang dikenal sebagai “Pesta Sekolah” (Taneo et al., 2022). Secara aksiologis, tradisi penggalangan dana bersama ini dijalankan berdasarkan hukum adat yang menganggap pendidikan anak sebagai tanggung jawab seluruh masyarakat (Japa, 2023). Kebiasaan ini menunjukkan eratnya hubungan antara budaya lokal dengan Pancasila, khususnya Sila Ketiga dan Sila Kelima. Hal ini tercermin dari prinsip *geal cama-cama, mendo cama-cama* (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul), yaitu semangat gotong royong daerah untuk menciptakan keadilan ekonomi demi mencerdaskan kehidupan bangsa (Awaliya & Utami, 2024; Lega & Ndorang, 2024).

Konstruksi kultural mengenai pembiayaan pendidikan komunal tersebut telah memicu akselerasi diskursus akademik yang berupaya memotret eksistensi modal sosial dalam tradisi Pesta Sekolah (Nainggolan et al. 2024). Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Sriwahyuni et al. (2021) serta Taneo et al. (2022), bahwa tradisi ini dinilai secara konsisten berhasil memelihara kohesi sosial, memperkuat integrasi kekerabatan, dan berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang efektif bagi masyarakat pedesaan. Namun, pandangan yang terlalu menyederhanakan masalah pada penelitian-penelitian terdahulu membuat analisisnya menjadi sangat terbatas. Fenomena ini cenderung hanya dilihat dari sisi baiknya saja, tanpa mengantisipasi adanya perubahan perilaku masyarakat yang menyimpang di lapangan. Akibatnya, muncul celah besar yang belum diteliti dalam realitas kehidupan nyata masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan studi terdahulu yang mengonfrontasikan data makroekonomi pemerintah dengan realitas pembengkakan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk kegiatan pesta. Melalui sudut pandang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian ini hadir untuk membongkar bagaimana kepentingan pribadi yang praktis telah mengubah nilai luhur gotong royong menjadi hubungan yang serba hitung-hitungan untung-rugi. Realitas perubahan sosial inilah yang luput dari perhatian dan analisis para peneliti sebelumnya.

Keterbatasan teori ini terjawab melalui kenyataan di Desa Golo Langkok. Berdasarkan observasi empiris peneliti dilapangan menunjukkan adanya perubahan arah dalam Pesta Sekolah, di mana tradisi yang harusnya menjadi wadah solidaritas sosial, kini justru dimanfaatkan untuk mengumpulkan modal dan mengejar status sosial pribadi. Bentuk penyimpangan ini bisa dilihat dari cara orang tua mengelola keuangan pesta. Dana sumbangan yang terkumpul tidak dipakai untuk keperluan utama kuliah anak, seperti membayar semesteran atau pengadaan literatur. Sebaliknya, uang tersebut malah digunakan untuk belanja kebutuhan non-pendidikan, meliputi renovasi rumah, membeli kendaraan bermotor, hingga barang elektronik. Penyimpangan alokasi ini memicu kontradiksi sosiologis berupa tingginya angka risiko putus studi di tingkat perguruan tinggi bagi mahasiswa, meskipun perhelatan ritual dikemas secara masif dan menelan biaya operasional yang besar (Aina et al., 2024). Secara aksiologis, fenomena komodifikasi budaya ini mencerminkan pelemahan etika kewargaan (*civic morality*) serta pengabaian

tanggung jawab sosial (*civic responsibility*), di mana kepentingan kolektif dikalahkan oleh kalkulasi pragmatisme individualistik (Nurhadi et al., 2022). Melalui pembongkaran realitas ini, kebaruan studi secara sistematis diletakkan pada pendekatan kritis untuk melihat pergeseran semangat kebersamaan menjadi tujuan ekonomi semata. Penurunan moral Pancasila di tingkat desa dijadikan sebagai acuan utama analisis.

Berangkat dari kompleksitas persoalan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas proses pergeseran nilai budaya dalam Pesta Sekolah. Di samping itu, studi ini ingin memetakan faktor-faktor penentu yang mengubah fungsi alat sosial tersebut menjadi wadah pengumpulan keuntungan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperbaiki pendidikan karakter berbasis masyarakat, sebab melupakan esensi gotong royong bisa memicu perpecahan sosial. Secara teoretis, studi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terutama dalam menyediakan literatur tentang cara menjaga ketahanan budaya lokal dari pengaruh arus materialisme global. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai dasar formulasi kebijakan sosial bagi para pemangku adat dan pendidik formal untuk merevitalisasi kearifan lokal masyarakat Manggarai, seperti filosofi *Lonto Leok* yang secara harafiah adalah duduk melingkar, agar kembali berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dengan menata ulang tradisi ini, kita tidak hanya menyelamatkan masa depan pendidikan anak muda dari kepentingan materi sepihak, tetapi juga memastikan budaya lokal tetap kokoh sebagai perekat kebersamaan warga.

Konsep solidaritas sosial jika ditinjau dari lokus Pendidikan Kewarganegaraan merupakan elemen fundamental dalam membentuk struktur kebudayaan kewargaan (*civic culture*) yang berbasis pada nilai komunitarian (Mas'ud & Istianah, 2025). Solidaritas tidak sekadar dimaknai sebagai keterikatan emosional pasif, melainkan sebuah bentuk keterlibatan warga negara yang aktif (*civic engagement*) untuk memikul konsekuensi kesejahteraan komunitas secara bersama-sama (Dewanti et al., 2023; Mas'ud, Silla, et al., 2025). Melalui integrasi teori fungsionalisme struktural kontemporer dan teori civic virtue, keterlibatan komunal dalam tradisi lokal seperti Pesta Sekolah dianalisis sebagai ruang artikulasi kebijakan sipil yang mengonversi tanggung jawab privat menjadi tanggung jawab sosial (Halimah & Anisah, 2018; Sriwahyuni et al., 2021). Karakter warga negara (*civic character*) dibentuk dan diuji secara empiris di dalam ekosistem budaya ini, di mana kepedulian terhadap aksesibilitas pendidikan sesama warga mencerminkan kedewasaan moralitas politik masyarakat (Istianah & Komalasari, 2023; Peterson & Civil, 2023). Berlandaskan filosofi Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial yang berketuhanan, jalinan solidaritas ini bertindak sebagai jaring pengaman sosial mandiri (*social safety net*) yang menolak implikasi buruk dari segregasi kelas ekonomi (Ali & Huda, 2022). Kajian global mengenai penguatan modal sosial Suryahadi et al. (2024) serta manifestasi keadilan distributif Estefan, (2024) mempertegas bahwa keberadaan pranata lokal yang dihidupi oleh etika kewargaan yang fungsional terbukti efektif dalam meminimalisasi ketimpangan sosial di negara berkembang. Dengan demikian, rekonstruksi solidaritas sosial kedaerahan ini menjadi sangat krusial untuk dikaji agar ia tetap kokoh sebagai pilar penopang kohesi nasional di tengah gempuran disintegrasi moral.

Manifestasi kebudayaan kewargaan kontemporer tersebut kini dihadapkan pada arus deras globalisasi dan modernisasi yang membawa penetrasi ideologi materialisme ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat pedesaan (Dikrurohman, 2023). Berdasarkan teori perubahan sosial sistematis, modernisasi tidak hanya mengubah aspek teknologis dan infrastruktur, melainkan juga mentransformasi struktur nilai sosial, pola pikir, dan orientasi hidup masyarakat secara mendasar (Zhanbayev et al., 2023). Arus global ini membawa serta gaya hidup konsumtif yang perlahan menggeser nilai guna suatu tradisi menjadi nilai tukar ekonomis demi memuaskan kebutuhan materi sepihak. Akibatnya, muncul krisis moralitas yang ditandai dengan menguatnya paham individualisme, di mana individu cenderung

mengutamakan pemenuhan kepuasan dan status sosial pribadi di atas kepentingan komunitas (Novita, 2025). Pengaruh budaya konsumtif ini secara langsung mendegradasi semangat solidaritas sosial yang semula menjadi fondasi utama Pesta Sekolah, mengubah sebuah ritual gotong royong yang sarat makna pengabdian menjadi ruang kontestasi kemewahan yang transaksional (Mas'ud & Istianah, 2025). Pergeseran ini mempertegas bahwa tanpa adanya ketahanan moral yang kuat, modernisasi akan terus mendorong terjadinya pendangkalan nilai kearifan lokal serta mempercepat runtuhnya kohesi sosial di tingkat akar rumput (Mas'ud, Benu, et al., 2025).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak secara spesifik pada konstruksi analisis kritis yang membedah peralihan fungsi utama tradisi lokal kedaerahan dari motif pengabdian sosial menjadi sarana pemenuhan kepentingan ekonomi pribadi, dengan menggunakan indikator degradasi moralitas Pancasila sebagai pisau analisis utama. Urgensi akademik dari kajian ini berpusat pada penelusuran faktor-faktor determinan di tingkat akar rumput yang mempercepat pergeseran nilai tersebut, sebuah aspek yang krusial bagi penataan kembali ketahanan moralitas publik. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perluasan literatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya mengenai dinamika adaptasi serta kerentanan kebudayaan kewargaan (*civic culture*) lokal dalam membendung penetrasi arus individualisme modern. Implikasi praktis dari hasil studi ini diarahkan sebagai rujukan strategis dalam penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, guna merevitalisasi kebajikan sipil generasi muda agar kembali selaras dengan etika Pancasila. Berdasarkan seluruh pemetaan sosiologis tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama, yaitu: pertama, bagaimana proses dekonstruksi nilai kegotongroyongan dan keretakan kohesi sosial warga dalam pelaksanaan Pesta Sekolah di Desa Golo Langkok? Kedua, bagaimana bentuk penyimpangan tata kelola keuangan hasil komodifikasi budaya tersebut yang berdampak pada peningkatan risiko putus sekolah mahasiswa? Melalui rumusan masalah tersebut, artikel ini secara definitif bertujuan untuk menganalisis proses dekonstruksi nilai kegotongroyongan dalam pelaksanaan Pesta Sekolah di Desa Golo Langkok serta merumuskan orientasi fungsionalnya yang ideal sebagai jaring pengaman ekonomi pendidikan yang berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena perubahan sudut pandang masyarakat terhadap tradisi Pesta Sekolah. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Alasan utama pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya frekuensi pelaksanaan Pesta Sekolah di tengah tren peningkatan garis kemiskinan daerah, yang mengindikasikan adanya dinamika komodifikasi budaya lokal yang sangat kuat dibanding wilayah lain. Pengumpulan data lapangan ini diselenggarakan dalam durasi satu bulan penuh, yang dimulai pada awal hingga akhir bulan Maret 2026. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan total 12 orang informan kunci, terdiri atas 2 orang tokoh adat (*Tu'a Golo*), 4 orang penyelenggara pesta, 4 orang masyarakat penyumbang, dan 2 orang mahasiswa penerima manfaat. Data primer dihimpun melalui observasi partisipatif pada ritual *wuat wa'i* serta wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi laporan keuangan pesta dan literatur terkait. Teknik analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang diawali dengan pengumpulan data, dilanjutkan proses coding atau pengodean transkrip wawancara untuk kategorisasi tema, penyajian data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan. Pada tahap pengodean (*coding*) ini, peneliti memetakan transkrip wawancara informan ke dalam beberapa kategori pengodean tema yang diintegrasikan secara sistematis, meliputi Tema 1: mengenai Pergeseran Orientasi Nilai Tradisi untuk melacak transformasi motivasi pelaksanaan tradisi oleh warga ke arah kepentingan materiil; Tema 2: mengenai Komodifikasi Budaya Lokal guna mendokumentasikan reduksi simbol-simbol adat

dan mekanismenya sebagai sarana akumulasi profit finansial personal; Tema 3: mengenai Pendangkalan Solidaritas Sosial untuk mengodekan anomali relasi kekerabatan warga menjadi pola resiprokal transaksional berupa utang-piutang sosial; Tema 4: mengenai Degradasi Etika Kewargaan Lokal yang mengaitkan temuan empiris penyimpangan pengelolaan dana di tingkat desa dengan tolok ukur indikator kemerosotan karakter moral Pancasila; serta Tema 5: mengenai Polarisasi dan Eksklusi Sosial Warga Kelas Bawah yang mengaitkan temuan empiris tindakan pengucilan simbolis serta keretakan relasi kekerabatan di tingkat akar rumput dengan tolok ukur indikator runtuhnya kohesi sosial komunal Guna menjamin keabsahan dan validitas temuan, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik secara rinci, seperti mengonfrontasikan pengakuan penyelenggara dengan catatan riil penggunaan dana serta pandangan tokoh adat. Aspek etika penelitian juga diterapkan secara ketat dengan menjamin asas anonimitas (merahasiakan identitas asli informan) dan lembar persetujuan (*informed consent*) sebelum proses pengambilan data dimulai.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data lapangan yang dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan di Desa Golo Langkok mengonfirmasi adanya perubahan mendasar pada tujuan pelaksanaan Pesta Sekolah. Tradisi yang secara historis berfungsi sebagai media gotong royong untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan tinggi, kini cenderung bergeser menjadi sarana pengumpulan modal materi dan ajang pembuktian status sosial di tengah masyarakat (Taneo et al., 2022). Temuan dari empat penyelenggara pesta yang diwawancarai menunjukkan bahwa fokus perhatian mereka telah beralih pada pencapaian keuntungan finansial pascapesta, bukan lagi pada perencanaan tabungan pendidikan anak jangka panjang.

Untuk mengonfirmasi problem pelaksanaan Pesta Sekolah, penulis mengambil data yang dilakukan dengan mewawancarai informan. Berikut representasi informan yaitu: (1) penyelenggara pesta; (2) tokoh adat; (3) masyarakat penyumbang; (4) warga ekonomi rentan; (5) mahasiswa penerima. Mengingat adanya kesamaan pola jawaban di dalam tiap kelompok subjek, kutipan yang disajikan di bawah ini merupakan representasi verbatim inti yang telah mewakili pandangan keseluruhan 12 informan di lapangan. Berikut kutipan hasil wawancaranya.

Penyelenggara pesta dengan inisial Bapak S.N. (45 tahun) menyatakan demikian tentang motivasinya secara terbuka,

“Kalau kita tidak pakai catering dan musik modern, gengsi dengan orang kampung. Masalah uang kuliah anak itu nanti dipikirkan setelah pesta, yang penting modal operasional pesta tertutupi dan ada sisa keuntungan bersih untuk keperluan di rumah.”

Mengenai degradasi nilai kultural tersebut, Bapak N.H. (68 tahun) selaku tokoh adat (Tu'a Golo) setempat memaparkan keprihatinannya,

“Kalau dilihat dari luar, ritual wuat wa'i atau titip doa itu memang masih jalan. Masih ada potong ayam, masih ada serah tuak kapu. Tapi dia punya batin ini sudah beda jauh. Dulu itu kita kumpul karena betul-betul kasihan, ada anak dari keluarga setengah mati yang mau pergi kuliah. Sekarang? Upacara adat itu cuma jadi alasan di atas kertas saja. Sengaja kumpul orang banyak-banyak supaya mereka sumbang uang besar, biar tuan pesta bisa kejar target untung.”

Sifat kaku dari aturan timbal balik ini dipertegas melalui pernyataan salah satu warga penyumbang, Ibu B.N. (38 tahun),

“Kami sekarang merasa terbebani karena hampir setiap minggu ada undangan pesta sekolah. Mau tidak mau kami harus menyumbang sesuai dengan jumlah yang pernah mereka berikan kepada kami dulu, bahkan kalau bisa lebih tinggi agar tidak menjadi bahan omongan.”

Realitas pahit mengenai ketidaktransparanan ini juga diakui secara jujur oleh Y.T. (20 tahun), salah satu mahasiswa informan yang menyatakan,

“Saya merasa memikul ekspektasi seluruh orang kampung yang sudah sumbang uang untuk saya. Tapi kenyataan pahitnya, uang pesta yang megah itu sering kali tidak transparan pengelolaannya di tangan orang tua karena habis untuk bayar sewa tenda, katering, dan keperluan rumah yang konsumtif. Akibatnya, dana tersebut cuma cukup untuk biaya kuliah di tahun pertama saja, dan sekarang saya cemas rentan putus kuliah.”

Manifestasi runtuhnya kohesi komunal ini dikonfirmasi secara mendalam melalui penuturan seorang warga penyumbang yang tergolong ekonomi rentan, Ibu M.G. (49 tahun), yang mengisahkan dampak psikososial yang dialaminya,

“Kami ini orang kecil yang penghasilannya pas-pasan. Dua bulan lalu, tetangga menyelenggarakan pesta sekolah untuk anaknya. Dulu waktu anak saya pesta, dia datang menyumbang Rp200.000. Tapi karena kemarin saya betul-betul tidak ada uang, saya terpaksa hanya mampu mengisi amplop Rp50.000. Sejak saat itu, kalau ketemu di jalan desa atau di pancur air umum, mereka sengaja buang muka dan tidak mau bertegur sapa lagi. Di pertemuan lingkungan pun kami seperti dianggap tidak ada. Rasa persaudaraan di kampung ini sudah hilang, semua keramahan sekarang diukur pakai uang amplop.”

Untuk mengkristalkan seluruh data wawancara mendalam di atas, rangkaian informasi verbatim tersebut dirangkum ke dalam format kodifikasi tema pada tabel berikut ini. Penataan ini bertujuan untuk memetakan secara presisi titik-titik krusial diskoneksi antara regulasi kultural dengan realitas kebutuhan dasar subjek warga negara di lapangan.

Tabel 1. Pengkodean data verbatim informan

Informan	Pernyataan kunci	Kode tema
S.N (Penyelenggara pesta)	“Kalau kita tidak pakai katering dan musik modern, gengsi... sisa keuntungan bersih untuk keperluan di rumah.”	Tema 1: Pergeseran Orientasi Nilai Tradisi
N.H (Tokoh adat)	“Upacara adat itu cuma jadi alasan di atas kertas saja... Sengaja kumpul orang banyak-banyak supaya... kejar target untung.”	Tema 2: Komodifikasi Budaya Lokal
B.N (warga penyumbang)	“Kami sekarang merasa terbebani... menyumbang sesuai dengan jumlah yang pernah mereka berikan... agar tidak menjadi bahan omongan.”	Tema 3: Pendangkalan Solidaritas Sosial (utang sosial)
Y.T (Mahasiswa)	“...uang pesta yang megah itu sering kali tidak transparan pengelolaannya... dana tersebut cuma cukup untuk biaya kuliah di tahun pertama saja...”	Tema 4: Degradasi Etika Kewargaan Lokal
M.G (warga ekonomi rentan)	“Sejak saat itu... mereka sengaja buang muka... Rasa persaudaraan di kampung ini sudah hilang, semua keramahan sekarang diukur pakai uang amplop.”	Tema 5: Polarisasi dan Eksklusi Sosial Warga Kelas Bawah

Berdasarkan data di atas, terlihat pola masalah sistemik dalam pelaksanaan Pesta Sekolah di Desa Golo Langkok yang melampaui isu teknis seremonial. Pertama, terjadi pengabaian kebutuhan esensial jangka panjang (tabungan pendidikan anak) demi pengadaan fasilitas non-esensial dan seremonial modern yang didasari gengsi sosial. Kedua, kaku dan ketatnya aturan timbal balik sumbangan menimbulkan beban ekonomi serta kecemasan mendalam di tingkat warga penyumbang. Ketiga, dari perspektif sosial, kebijakan kultural ini dinilai mengalami pendangkalan nilai moral dengan lebih memprioritaskan target keuntungan finansial pribadi di atas nilai ketulusan. Keempat, kelompok warga dengan ekonomi rentan dan mahasiswa berada dalam posisi pasif, dilematis, serta rentan menerima sanksi pengucilan simbolis akibat ketidakmampuan finansial memenuhi standar utang sosial tersebut.

Data wawancara yang terangkum pada Tabel 1 diperkuat oleh hasil observasi peneliti yang mendokumentasikan fenomena sanksi sosial materialistik baru berupa stigmatisasi sosial verbal (gosip publik). Ketika ada warga yang teridentifikasi menyumbang di bawah standar minimal kelayakan atau utang masa lalu, identitas finansial keluarga mereka dijadikan bahan perbincangan negatif dalam ruang-ruang informal warga. Konsekuensi dari tekanan moral yang menyimpang ini memaksa warga yang tidak mampu untuk secara sadar menarik diri dari aktivitas kegotongroyongan lainnya karena merasa rendah diri dan terhina secara sosial. Penurunan karakter kewargaan (*civic character*) komunal ini tercermin dari hilangnya toleransi (*civic tolerance*) dan kepedulian sosial (*civic engagement*) yang tulus, digantikan oleh kalkulasi individualistik yang diskriminatif.

Ditinjau dari perspektif makroekonomi, fenomena ini memicu kontradiksi sosiologis yang tajam jika disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai periode 2023–2025. Instrumen statistik mencatat peningkatan Garis Kemiskinan yang menyentuh angka Rp541.171 per kapita per bulan pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, 2026). Di tengah beratnya tekanan ekonomi rumah tangga tersebut, tren penyelenggaraan Pesta Sekolah justru tetap masif dengan pengeluaran biaya operasional seremonial yang sangat tinggi. Hal ini selaras dengan data BPS mengenai proporsi pengeluaran rata-rata per kapita, di mana alokasi untuk kelompok non-makanan, khususnya biaya upacara adat dan pesta, tetap menempati porsi signifikan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang rentan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan rasionalitas ekonomi demi memenuhi tuntutan resiprokal dan gengsi sosial yang semu, sehingga memperlebar jurang antara status sosial yang dipamerkan dengan kondisi kesejahteraan ekonomi yang sebenarnya (Peng, 2023).

Kontradiksi sosiologis ini memperlihatkan bahwa di tengah tekanan ekonomi makro yang tergambar dari data BPS, Pesta Sekolah di Desa Golo Langkok telah bergeser fungsi menjadi sebuah “arisan sosial yang dipaksakan”. Ketidakrasionalan tindakan ekonomi masyarakat, di mana mereka rela berutang demi menyelenggarakan pesta megah, sebenarnya merupakan strategi spekulatif untuk mengumpulkan modal instan dalam jangka pendek. Penyelenggara pesta mengalkulasikan bahwa kemegahan acara, penggunaan catering, dan hiburan modern akan memicu rasa sungkan (gengsi sosial) dari warga penyumbang, sehingga mendorong nominal amplop yang masuk melampaui modal operasional awal. Dengan demikian, ritual yang semula berorientasi pada jaring pengaman sosial kebersamaan kini terjebak dalam logika pasar yang spekulatif dan penuh risiko finansial bagi ketahanan domestik keluarga.

Penurunan kadar solidaritas sosial dalam perspektif Emile Durkheim di lokus penelitian ini ditandai oleh melemahnya kesadaran kolektif yang tulus, berganti menjadi hubungan kontraktual-transaksional (Estefan, 2024). Indikator melemahnya kesadaran kolektif ini tecermin dari pergeseran fungsi sanksi sosial; jika dahulu warga yang tidak berpartisipasi dalam *wuat wa'i* (bekal perjalanan) dikritik karena dianggap abai terhadap masa depan generasi bangsa, kini sanksi tersebut bergeser menjadi “omongan” atau gosip materialistik jika nominal amplop yang dikembalikan tidak setara dengan utang sosial masa lalu (Symanck, 2025). Selaras dengan pemikiran Pitirim Sorokin, realitas ini merepresentasikan transisi dramatis dari kebudayaan ideasional yang berlandaskan nilai moral-spiritual

luhur geal cama-cama, menuju kebudayaan sensat yang mendewakan kepuasan indrawi, kemewahan seremonial, dan akumulasi materi sepihak (Kychkyruk & Salata, 2021). Sakralitas simbol adat seperti pemotongan ayam dalam *wuat wa'i* (bekal perjalanan) pada akhirnya direduksi sekadar sebagai instrumen legitimasi untuk mengejar laba pribadi penyelenggara. (Antonovski, 2020).

Temuan di Desa Golo Langkok ini menunjukkan kontras yang signifikan apabila dikomparasikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang melihat Pesta Sekolah dari sudut pandang fungsional-positif. Jika studi Sriwahyuni et al. (2021) menekankan bahwa eksistensi tradisi ini bertahan karena fungsinya sebagai ritual doa dan simbol pengorbanan kolektif, hasil penelitian saat ini justru membongkar sisi anomali di mana sakralitas ritual tersebut telah terfragmentasi oleh praktik pengejaran keuntungan pribadi. Senada dengan hal tersebut, penelitian Taneo et al., (2022) dan Jebarus, (2023) mendeskripsikan Pesta Sekolah sebagai bentuk rekayasa sosial yang murni dijiwai semangat gotong royong. Namun, temuan di lokasi penelitian saat ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai tersebut telah mengalami pendangkalan makna menjadi orientasi komersial di luar agenda pendidikan, bahkan bertolak belakang dengan kajian Ngenta, (2025) yang melihat tradisi ini sebagai pengejawantahan solidaritas keagamaan yang integral.

Perbedaan temuan yang kontras antara penelitian ini dengan kajian terdahulu seperti (Sriwahyuni et al., 2021; Taneo et al., 2022; dan Jebarus, 2023) menegaskan adanya dinamika degradasi moralitas publik yang bergerak sangat akseleratif dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada studi Taneo et al. (2022) potret rekayasa sosial Pesta Sekolah masih didominasi oleh kemurnian jiwa gotong royong, temuan empiris pada tahun 2026 ini membuktikan bahwa ekosistem budaya di Kecamatan Rahong Utara telah mengalami anomali serius akibat tidak mampunya ketahanan moralitas lokal membendung penetrasi arus individualisme dan gaya hidup konsumtif modern. Kebaruan studi ini berhasil membongkar bahwa dukungan sosial yang dalam kajian Nanu et al. (2019) berfungsi meningkatkan motivasi berprestasi, kini justru telah bermutasi menjadi beban psikososial bagi mahasiswa akibat manajemen keuangan orang tua yang tidak transparan dan korup demi gengsi sosial.

Guna membendung pembengkakan biaya seremonial spekulatif tanpa mematisasi esensi Pesta Sekolah sebagai jaring pengaman sosial, struktur adat *Tu'a Golo* (tua adat) memiliki peran strategis untuk mentransformasikan kembali kearifan lokal melalui skema fungsionalisasi *Lonto Leok* (duduk melingkar/musyawarah adat). Implementasi operasional kontrol adat tersebut dijalankan secara konkret melalui tiga tahapan konseptual yang diwujudkan oleh lembaga adat desa. Pertama, tahap pra-kondisi finansial tersertifikasi, di mana setiap warga yang berniat menyelenggarakan Pesta Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada *Tu'a Golo*. Sebelum izin adat (berupa restu pelaksanaan upacara *wuat wa'i*) dikeluarkan, *Tu'a Golo* beserta perangkat adat menggelar musyawarah terbatas untuk memverifikasi bukti riil kelulusan calon mahasiswa di perguruan tinggi serta draf rencana anggaran biaya (RAB) operasional pesta. Kedua, tahap pembatasan standardisasi logistik, di mana lembaga adat menerapkan konsensus lokal yang melarang keras penggunaan catering mewah komersial dan sistem pelantang suara (sound system) modern berbayar mahal, serta mengembalikannya pada sistem *podo/lili* (penyediaan pangan lokal berbasis gotong royong warga kampung). Melalui skema ini, biaya operasional dapat ditekan hingga 70%, sehingga memastikan bahwa sirkulasi uang sumbangan (*amplop*) yang masuk tidak habis terjebak untuk menutup utang modal operasional seremonial semu. Ketiga, tahap pengawasan akuntabilitas pasca-pesta, di mana seminggu setelah acara usai, penyelenggara wajib melakukan pelaporan keuangan terbuka di hadapan *Tu'a Golo* dan perwakilan masyarakat penyumbang melalui forum *Lonto Leok*. Dana bersih yang terkumpul kemudian dialihkan ke dalam bentuk rekening tabungan pendidikan berjangka atas nama mahasiswa bersangkutan yang diawasi secara berkala oleh lembaga adat desa. Melalui model restrukturisasi nilai kultural ini, *Lonto Leok* tidak sekadar diposisikan sebagai simbol pertemuan fisik seremonial, melainkan dimanifestasikan sebagai instrumen akuntabilitas warga (*civic accountability*) yang melestarikan marwah tolong-menolong asli masyarakat Manggarai secara berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Kondisi pelaksanaan Pesta Sekolah di Desa Golo Langkok saat ini memicu ketidakselarasan yang tajam dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) (Istianah et al., 2021). Secara filosofis, tradisi ini dirancang sebagai jaminan sosial mandiri yang mencerminkan jiwa gotong royong untuk pemerataan akses pendidikan tanpa sekat ekonomi (Istianah, 2021). Namun, ketika praktik tersebut berubah orientasi menjadi ajang kejar keuntungan dan pamer kemewahan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta mandat ekonomi kekerabatan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadi terabaikan. Egoisme individu dalam mengejar status sosial telah memicu penurunan karakter kewargaan di tingkat komunitas (Kale et al., 2025). Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang penting bagi bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya dalam hal penguatan kebudayaan kewargaan berbasis komunitas lokal. Studi ini menunjukkan bahwa kelestarian tradisi daerah sangat bergantung pada ketahanan moralitas publik yang menghidupinya, di mana PKn berperan strategis mengintegrasikan nilai kearifan lokal yang adaptif ke dalam kurikulum pendidikan karakter guna membentengi warga dari dampak individualisme global.

Secara praktis, hasil penelitian ini membawa implikasi penting bagi dua sektor utama, yaitu masyarakat adat dan institusi pendidikan karakter. Bagi masyarakat adat, para tokoh adat (*Tu'a Golo*) perlu berpikir kritis dan tegas dalam menata kembali aturan atau norma adat di desa. Lembaga adat harus mampu mengontrol biaya operasional seremonial pesta agar tidak melampaui kemampuan finansial riil masyarakat dan mengembalikan fungsi utama kegiatan pada pembiayaan pendidikan anak. Sementara bagi pendidikan karakter, institusi pendidikan formal di daerah perlu menyusun model pembelajaran yang kontekstual dengan merevitalisasi nilai luhur seperti filosofi *Lonto Leok* (duduk melingkar). Oleh karena itu, institusi pendidikan formal dan pemangku adat perlu merevitalisasi filosofi *lonto leok* (duduk melingkar) bukan sekadar sebagai simbol pertemuan fisik, melainkan sebagai instrumen akuntabilitas warga (*civic accountability*).

Melalui ruang musyawarah adat *lonto leok* (duduk melingkar) yang dipimpin oleh *tu'a golo* (tua adat), komunitas desa harus merumuskan konsensus atau regulasi adat baru yang membatasi standarisasi biaya operasional pesta (seperti larangan penggunaan catering mewah dan sound system modern yang berlebihan) guna memutus rantai utang sosial yang menekan warga. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan berbasis komunitas, *lonto leok* (duduk melingkar) diorientasikan kembali sebagai wadah edukasi nilai Pancasila untuk membangun transparansi dan komitmen moral antara orang tua dan anak, sehingga pemenuhan hak akademik mahasiswa tetap menjadi prioritas utama di atas kalkulasi untung-rugi personal. Pendidikan karakter harus diarahkan untuk membangun kembali pemahaman peserta didik dan orang tua mengenai transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana, serta pentingnya mendahulukan kewajiban pemenuhan hak akademik anak daripada pemenuhan gengsi sosial yang semu.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran makna Pesta Sekolah di Desa Golo Langkok dari tradisi solidaritas sosial berbasis nilai *geal cama-cama*, *mendo cama-cama* (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul) menjadi praktik yang cenderung transaksional dan berorientasi pada keuntungan ekonomi. Tradisi yang semula bertujuan membantu keberlanjutan pendidikan anak kini sering dimanfaatkan untuk kepentingan prestise pribadi, sehingga mengurangi nilai ketulusan, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya pelemahan nilai budaya lokal sekaligus krisis moral dalam praktik sosial masyarakat. Sebagai output nyata untuk mengatasi anomali tersebut, penelitian ini menghasilkan solusi strategis berupa skema konseptual pengendalian biaya melalui revitalisasi fungsi lembaga adat *Lonto Leok* (musyawarah adat). Output taktis yang direkomendasikan mencakup pembatasan biaya operasional seremonial secara ketat hingga 70% melalui pelarangan catering komersial dan hiburan modern, pemutakhiran sistem verifikasi

administrasi pra-pesta oleh *Tu'a Golo*, serta kewajiban pelaporan keuangan terbuka pasca-pesta. Mekanisme kontrol ini menjadi output fungsional guna memutus rantai utang sosial yang memberatkan warga sekaligus mengamankan alokasi dana sumbangan murni ke dalam rekening tabungan pendidikan berjangka milik mahasiswa. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kembali nilai gotong royong, pendidikan karakter, serta revitalisasi nilai Pancasila melalui peran tokoh adat dan masyarakat agar Pesta Sekolah kembali berfungsi sebagai bentuk dukungan sosial pendidikan yang adil dan bermakna. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas penerapan model pengelolaan dana Pesta Sekolah yang transparan dan akuntabel ini di wilayah lain, sehingga kearifan lokal tetap relevan serta berdampak positif bagi ketahanan akademik generasi muda.

Referensi

- Aina, C., Aktaş, K., & Casalone, G. (2024). Effects of workload allocation per course on students' academic outcomes: Evidence from STEM degrees. *Labour Economics*, 90, Article 102559. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2024.102559>
- Ali, M., & Huda, N. (2022). Pancasila economic concepts in Shari'ah economic perspective. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 16(2), 255–272.
- Antonovskiy, A. Y. (2020). Sorokin Pitirim revisited: His place in social philosophy as a transdisciplinary thinker. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. <http://dx.doi.org/10.17516/1997-1370-0639>
- Awaliya, T. P., & Utami, R. D. (2024). Strengthening the gotong royong character of elementary school students through cooperative learning. *Inovasi Kurikulum*, 21(3), 1763–1780. <https://doi.org/10.17509/jik.v21i3.73624>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. (2026). *Profil kemiskinan Kabupaten Manggarai 2021–2025*. <https://manggarai.kab.bps.go.id/id/pressrelease/2026/04/30/101/profil-kemiskinan-kabupaten-manggarai-2025.html>
- Dewanti, P. A., Alhudawi, U., & Hodriani. (2023). Gotong royong dalam memperkuat partisipasi warga negara (civic participation). *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/pcej.v2i1.13753>
- Dikrurohman, D. (2023). Analysis of social change in rural communities due to the influence of urbanization and globalization in Indonesia. *Journal Edunity*, 2(3).
- Estefan, M. (2024). Deliberative interdependence: A Durkheimian approach to promoting collaborative learning in diverse classrooms. *Sociological Focus*, 57(1), 21–26. <https://doi.org/10.1080/00380237.2023.2283722>
- Halimah, L., & Anisah, A. (2018). Internalisasi nilai pendidikan kewarganegaraan pada tradisi pesta laut Blanakan dalam rangka pengembangan ideal democratic citizen. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 148–160.
- Istianah, A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan di era metaverse. *Jurnal Gatranusantara*, 19(1), 148–155.
- Istianah, A., & Komalasari, K. (2023). Membangun jati diri bangsa dan karakter keindonesiaan dalam menghadapi tantangan isu global melalui pendidikan kewarganegaraan. *Journal of Social Science and Education*, 4(1), 96–106.
- Istianah, A., Mazid, S., & Susanti, R. P. (2021). Strategi pembelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pembentuk karakter mahasiswa. *Heritage*, 2(1), 17–31. <https://doi.org/10.35719/hrtg.v2i1.37>
- Japa, H. B. J. B. (2023). Praksis budaya Lonto Leok sebagai wujud pemersatu orang Manggarai. *Jurnal Budaya Nusantara*, 6(1), 195–204. <https://doi.org/10.36456/JBN.vol6.no1.6796>
- Jebarus, S. (2023). *Makna sosial "pesta sekolah" pada masyarakat Poka—Manggarai* [Undergraduate thesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero]. Repository Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/1488>
- Kale, D. Y. A., Mas'ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh di era digital. *Media Sains*, 25(1), 9–14. <https://doi.org/10.69869/54ce0473>
- Kychkyruk, T., & Salata, H. (2021). On Pitirim Sorokin, civilizational theory, and creative altruism. *Humanitarian Studios: Pedagogics, Psychology, Philosophy*, 12(1), 98–103.

<https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.01.098>

- Lega, F., & Ndirang, T. (2024). Kumpul kope and pesta sekolah as a means of interreligious dialogue in Manggarai, East Nusa Tenggara. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture (ICEHHA 2023)*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-12-2023.2345649>
- Mas'ud, F., & Istianah, A. (2025). Digitalisasi informasi kewarganegaraan: Antara inovasi terbuka dan kekhawatiran privasi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 155–160.
- Mas'ud, F., Benu, A., Bulu, D. M., Ay, S. W. O., Gudhu, Y. N., & Nomleni, I. S. (2025). Globalisasi dan pergeseran dimensi budaya lokal: Tantangan pelestarian nilai tradisional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 293–301. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.40013>
- Mas'ud, F., & Istianah, A. (2025). Ekosistem digital dan narasi kebangsaan: Relevansi Pancasila sebagai penuntun etika publik virtual. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 18–26. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i1.21505>
- Mas'ud, F., Silla, D., Ly, R. G., Kontesa, A. F., Letma, F., Toga, T. K. H., & Kontesa, F. (2025). Civic literacy: Literasi kewarganegaraan digital sebagai upaya pencegahan disinformasi di kalangan siswa SMA di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 39–50.
- Nainggolan, D. M., Nainggolan, R., Hakim, A. J., Abriansah, M., Acung, W., & Mohede, H. S. (2024). Building solidarity and cooperation among students through the gotong royong program at the Indonesian School of Kuala Lumpur. *Teumulong: Journal of Community Service*, 2(3), 161–174. <https://doi.org/10.62568/jocs.v2i3.147>
- Ngenta, A. (2025). *Nilai solidaritas dalam pesta sekolah pada masyarakat Desa Pongkor: Ditinjau dari perspektif ajaran sosial gereja dan implikasinya bagi karya pastoral gereja* [Master's thesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero]. Repository Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. <http://repository.iftkledalero.ac.id/3576/>
- Novita, R. (2025). *Analisis budaya konsumerisme di kalangan remaja terhadap pengeluaran ekonomi orang tua di Desa Kotasari menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus di Desa Kotasari Kecamatan Kotagajah)* [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung].
- Nurhadi, I., Sumarti, T., Hadi Dharmawan, A., & Damanhuri, D. S. (2022). Cultural commodification and ethical transition of tourism development: A case in Osing community, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 24–43. <https://doi.org/10.22500/10202238564>
- Peng, C. (2023). Household consumption and the discrepancy between economic and subjective poverty: The mediating roles of perceived social status and social connectedness. *Journal of Happiness Studies*, 24(5), 1703–1727.
- Peterson, A., & Civil, D. (2023). Virtues, values and the fracturing of civic and moral virtue in citizenship education policy in England. *Educational Review*, 75(7), 1313–1328.
- Pratama, D. A., & Khairunnisa, I. (2025). Pendidikan dan inovasi sebagai pilar pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. *Educatus*, 3(1), 29–36. <https://doi.org/10.69914/educatus.v3i1.32>
- Sriwahyuni, Salemuddin, M. R., & Visensia, H. (2021). Eksistensi budaya pesta sekolah di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(3). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i3.5955>
- Suryahadi, A., Rishanty, A., & Sparrow, R. (2024). Social capital and economic development in a large and multi-ethnic developing country: Evidence from Indonesia. *Asian Development Review*, 41(2), 301–323. <https://doi.org/10.1142/S0116110524500082>
- Susanto, T. T. D., Malyka, A., Fauzi, H., Faradisa, N., Rifatul, N., & Malfanda, T. (2025). Biaya tersembunyi dan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia: Analisis kebijakan dan dampak sosial-ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3282–3288. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>
- Symank, R. (2025). Durkheim's empire: The concept of solidarity and its colonial dimension. *American Political Science Review*, 119(3), 1361–1374. <https://doi.org/10.1017/S0003055424001023>
- Taneo, M., Bustan, F., & K, B. (2022). Makna sosial pesta sekolah dalam masyarakat Manggarai di Flores. *Haumeni Journal of Education*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v2i1.7120>
- Tusriyanto, Siminto, & Zaakiyyah, H. K. A. (2024). Innovative strategies to enhance the quality of higher education management: Human resource development and the critical role of communication. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 2(1),

331–336. <https://doi.org/10.61100/adman.v2i1.128>

Zhanbayev, R. A., Irfan, M., Shutaleva, A. V., Maksimov, D. G., Abdykadyrkyzy, R., & Filiz, Ş. (2023). Demoethical model of sustainable development of society: A roadmap towards digital transformation. *Sustainability*, 15(16), Article 12478. <https://doi.org/10.3390/su151612478>